

UPAYA INDIA DALAM MENDORONG INVESTASI ASING DAN PERDAGANGAN DI SUDAN TAHUN 2002 – 2011

Ni Ketut Leony Yulia Dewi¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Leonyyuliadewi@gmail.com, ldinfasisaka@unud.ac.id,

Bagussuryawidyanugraha@unud.ac.id

ABSTRACT

The 'Focus Africa' program launched after India's economic liberalization in 1991 had a significant impact on India's economic growth. The aim is to find new markets and natural resources for Indian private and public businesses. Sudan became one of the countries chosen because it has abundant natural resources, especially petroleum. Besides that Sudan is one of the countries with the most population in Africa. This research uses a qualitative method with data collection techniques through literature study. Data will be analyzed by descriptive analysis method using commercial diplomacy concept. Based on the analysis, concluded that India's efforts to encourage foreign direct investment and trade in Sudan through commercial diplomacy can be maximized through; Trade Promotion, Promotion of Foreign Direct Investment, Co-operation in Science and Technology, Advocacy for National Business Community, Networking & Public Relations and Contract Negotiator of Implementation.

Keywords: *Commercial Diplomacy, Foreign Direct Investment, Trade*

1. PENDAHULUAN

India merupakan salah satu Negara Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tingkat pertumbuhan PDB India sebesar 8% selama lima tahun terakhir dari 2002 hingga 2007 (www.bappenas.go.id, 2008). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sektor industri India yang terus mengalami perkembangan. Perkembangan industri India juga disebabkan karena kemajuan yang mendasar di bidang teknologi dan sumber daya manusianya. Dukungan lainnya juga berasal dari para korporasi India

yang gencar melakukan perdagangan dan investasi asing langsung dengan negara Lain.

Perkembangan ekonomi tersebut salah satunya dipicu oleh adanya liberalisasi ekonomi India tahun 1991. Pemerintah India yang ketika itu dipimpin oleh Narasimha Rao memutuskan untuk memulai reformasi, yang secara kolektif dalam media India disebut sebagai liberalisasi publik (Malone, D & Chaturvedy, Rajiv. 2009). Lebih lanjut dijelaskan oleh Malone, D dan Chaturvedy, Rajiv dalam tulisannya yang berjudul *Impact of India's Economy on its ForeignPolicy Since*

Independence (Malone, D & Chaturvedy, Rajiv. 2009) Narasimha Rao menunjuk Manmohan Singh sebagai penasihat ekonomi yang khusus ditunjuk untuk mengimplementasikan liberalisasi. Sehingga akhirnya reformasi berkembang lebih lanjut dengan mereformasi pasar modal, menderegulasi bisnis domestik dan mereformasi rezim perdagangan. Narasimha Rao juga memunculkan sebuah kebijakan yaitu '*Focus Africa*' untuk mendukung reformasi India. Program tersebut bertujuan untuk mendukung para pelaku ekonomi India baik dari perusahaan nasional maupun swasta dalam mengembangkan investasi asing maupun perdagangannya di Afrika. Diluncurkan pada tahun 2002, India mengawalinya dengan fokus pada 7 (tujuh) Negara di Afrika. Kemudian tahun 2003 diperluas lagi hampir ke seluruh Sub Sahara, sehingga berjumlah 24 Negara.

Salah satu negara yang menjadi tujuan program *Focus Africa* tersebut ialah Sudan. Sudan menjadi salah satu tujuan ekspansi ekonomi India khususnya dalam hal perdagangan dan investasi asing karena didukung dengan beberapa alasan yaitu, pertama sumber daya alam Sudan yang melimpah khususnya minyak bumi. Kedua, pertumbuhan ekonomi Sudan yang mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 2001 hingga 2010. Ketiga, Jumlah penduduk Sudan pada tahun 2003 sebesar 29,44 juta jiwa dengan pendapatan perkapitanya yaitu \$2.566,5, sehingga tergolong dalam *Low Middle Income* menurut

standar *World Bank* (id.tradingeconomics.com). Keempat, Sudan perlu untuk mengimpor beranekaragam komoditi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Serta yang terakhir, Sudan memerlukan bantuan perusahaan asing untuk membantu pembangunan di Sudan. Sehingga menarik bagi India untuk melakukan investasi asing dan perdagangan di Sudan dalam berbagai bidang.

Berawal dari perjanjian BITs (*Bilateral Investment Treaties*) pada 22 Oktober 2003, India berinvestasi di sektor minyak Sudan dengan jumlah yang besar. Melalui perusahaan Nasionalnya OVL (*ONGC Videsh Limited*) India berinvestasi sebesar \$750 juta pada sektor minyak Sudan. investasi India tersebut merupakan investasi terbesar keduanya di sektor minyak setelah tahun 2001 di Rusia (Lowenstein, 2005). Pada tahun 2003 hingga 2010 Sudan mewakili 46% dari produksi tahunan OVL. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011 minyak mentah mewakili 50% impor India di Sudan. Investasi terbesar kedua India di Sudan oleh BHEL (*Bharat Heavy Electricals Ltd*) sebesar \$350 juta dengan membuat pembangkit listrik tenaga gabungan sebesar 500MW di Kosti. Investasi India di Sudan ini didukung oleh 6 jalur kredit dari Bank *Export-Import* India sejak tahun 2004 dengan total \$567 juta. Sehingga pada tahun 1995 hingga 2005 Sudan merupakan salah satu Negara utama tujuan investasi asing India. Sejalan dengan hal tersebut Duta besar India untuk Sudan, Deepak Vohra juga mengatakan bahwa

“*Sudan Is Our Hope In Africa*” (Hurst.C, 2014:49).

Selain investasi minyak, India juga aktif melakukan perdagangan dengan Sudan. India mengekspor beraneka ragam komoditi seperti mesin, kendaraan dan produk manufaktur ke Sudan. Sehingga tahun 2002 total ekspor India ke Sudan mencapai \$582,74 juta. Kemudian tahun 2005 meningkat hingga mencapai \$1426,34 juta. India pun menjadi eksportir ke 6 terbesar di Sudan tahun 2006. Berdasarkan hal tersebutlah menarik bagi penulis untuk melihat upaya India dalam mendorong Investasi asing dan perdagangannya di Sudan dari tahun 2002 hingga 2011 melalui diplomasi komersial.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Terdapat 2 (dua) pembahasan dalam kajian pustaka ini. Pertama milik Lisa Carrin Brown (2016) yang berjudul “*Soft Power Efforts, Hard Power Gains: India Economic Diplomacy Towards Africa Using Nigeria And Kenya As Example*”. Tulisan Lisa (2016) secara garis besar memaparkan mengenai upaya dan strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh India di Nigeria dan Kenya. Upaya dan strategi tersebut dianalisa berdasarkan adanya liberalisasi ekonomi India pada tahun 1991. Hal tersebut memaksa India untuk memfokuskan kembali kebijakan luar negerinya ke seluruh dunia khususnya Afrika.

Strategi yang tepat diterapkan oleh India berdasarkan penelitian Lisa (2016)

memberikan gambaran bagi penelitian penulis bahwa India pasca liberalisasi memang melakukan perluasan pasar dan investasi asing di Afrika. Namun tulisan penulis menggunakan India dalam melihat upaya diplomasi ekonomi secara lebih khusus yaitu menggunakan diplomasi komersial. Berbeda dengan tulisan Lisa yang menggunakan diplomasi ekonomi untuk melihat strategi India di Nigeria dan Kenya.

Pembahasan kedua ialah tulisan milik Dewi Sofiah Resmi (2016) yang berjudul “*Diplomasi Ekonomi Di Kawasan Amerika Latin Dalam Forum For East Asian-Latin Cooperation (FEALAC)*”. Tulisan Resmi tersebut memperlihatkan strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam FEALAC untuk meningkatkan perdagangannya di kawasan Amerika Latin. Melalui *Forum East Asia Latin Cooperation (FEALAC)* yang berbentuk organisasi intraregional Indonesia dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Resmi (2016) lebih lanjut memaparkan mengenai strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam FEALAC. Strategi diplomasinya dilihat melalui 2 (dua) sudut pandang. Pertama, Strategi Internal melalui diplomasi komersial yang berfokus pada pembangunan jaringan para diplomat dan kelompok bisnis. Tujuannya ialah untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan advokasi bisnis serta penyediaan intelijen komersial, jaringan bisnis, mitra bisnis maupun bantuan bisnis. Kedua, strategi

eksternal melalui diplomasi perdagangan yaitu dimana strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berfokus pada berlangsungnya perdagangan bebas.

Strategi diplomasi ini menurut penelitian Resmi dapat berjalan dengan baik. Terlihat dalam pemanfaatan posisi Indonesia didalam hubungan kerjasama multilateral yang semakin menguat. Penelitian Resmi dan penulis memiliki konteks penelitian yang serupa. Penulis juga akan menggunakan Diplomasi Komersial dalam menganalisa permasalahan yang penulis angkat. Namun, perbedaannya analisa penulis lebih fokus pada upaya sebuah Negara dalam kerangka diplomasi komersial secara menyeluruh. Meskipun demikian, penelitian Resmi dapat membantu penulis dalam melihat bentuk dari sebuah diplomasi komersial yang dilakukan sebuah Negara.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Diplomasi Komersial

Terdapat berbagai pandangan mengenai konsep diplomasi komersial. Ada yang cenderung membedakan diplomasi ekonomi dan komersial, namun ada pula yang menganggap bahwa diplomasi komersial adalah nama lain bagi diplomasi ekonomi. Saner & Yiu dalam *International Economic Diplomacy: Mutations in the Post-modern Times* (Saner, R & Liu, Y, 2001) mengkategorikan beberapa jenis aktivitas diplomasi dengan perbedaan fungsinya

masing-masing yakni diplomasi ekonomi (*economic diplomacy*), diplomasi komersial (*commercial diplomacy*), diplomasi korporat (*corporate diplomacy*) dan diplomasi bisnis (*business diplomacy*).

Diplomasi Komersial menurut Kopp dalam *Commercial Diplomacy and the National Interest* (Kopp, 2004) memaparkan secara garis besar mengenai interpretasi terhadap konsep diplomasi komersial yang dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, interpretasi di tingkat makro, yaitu ketika konsep diplomasi komersial disamaartikan dengan konsep diplomasi ekonomi, diplomasi perdagangan, maupun diplomasi keuangan. Kedua, interpretasi di tingkat mikro, yaitu ketika diplomasi komersial didefinisikan secara lebih spesifik, khususnya mengarah pada dukungan yang diberikan terhadap sektor bisnis dan keuangan dalam negeri. Dukungan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan intensitas perdagangan, tetapi juga mengacu pada investasi ke dalam (*inward FDI*) dan luar negeri (*outward FDI*). Sehingga baik upaya promosi perdagangan maupun promosi investasi, akan dilakukan dalam prioritas yang setara. Hal tersebut sejalan juga dengan pemaparan dari Saner & Yiu mengenai diplomasi komersial. Untuk itu dalam tulisan ini penulis akan menggunakan interpretasi tingkat mikro. Karena dapat mengidentifikasi ide pokok dari konsep diplomasi komersial itu sendiri, tanpa harus dikaitkan dengan konsep - konsep diplomasi lainnya. .

Sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan bisnis dalam skala internasional, diplomasi komersial memiliki cakupan yang berupa perpaduan kerja sama antara pemerintah (negara) dengan pelaku bisnis (non-negara) untuk mencapai keuntungan ekonomi. Cakupan ini ditunjukkan oleh Potter dalam *Branding Canada: The Renaissance of Canada's Commercial Diplomacy* (Potter, 2004) dengan membagi aktivitas diplomasi komersial ke dalam dua kategori berdasarkan kepentingan dan kapasitas masing-masing aktor. Kategori pertama adalah bisnis, kategori ini terdiri dari lima aktivitas yang dinilai sebagai aktivitas utama dalam diplomasi komersial, yaitu *trade promotion*, *promotion of Foreign Direct Investments* (FDIs), *co-operation in science and technology*, *promotion on tourism*, dan *advocacy for national business community*. Sedangkan kategori kedua adalah pemerintah yang berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pencapaian aktivitas utama dengan memberikan empat aktivitas dukungan yang berupa *intelligence*, *networking and public relations*, *contract negotiator of implementation*, dan *problem solving*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Diperoleh melalui buku, jurnal dan berita baik dari televisi, koran maupun internet yang mengacu pada informasi tentang upaya

diplomasi komersial India terhadap Sudan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dengan teknik penyajian data berupa tabel dan narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri India Pasca Liberalisasi Ekonomi

India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, GDP atau pendapatan domestik bruto (PDB) India mencapai US\$2,25 triliun dan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. India juga pernah mencatat prestasi sebagai Negara dengan pertumbuhan tercepat sebesar 8% pada tahun 2003 (documents.worldbank.org). Lebih rinci dijelaskan dalam *India's Growth Story* yang termuat pada laman resmi worldbank (worldbank,2018).

Pertumbuhan ekonomi India ditengah krisis global tahun 2008 pun tidak mengalami kendala yang berarti. Subho Mukher (2013) dalam tulisannya yang berjudul *Global financial Crisis and It's Impact on India's Growth* mengatakan bahwa dampak dari krisis global tidak terlalu parah karena ketergantungan terhadap pasar ekspor yang rendah. Selain itu kontribusi yang cukup besar untuk PDB India berasal dari sumber - sumber domestik. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Rajya Sabha dalam laporan

sekretariatnya yang menyatakan bahwa “Proses pertumbuhan India sebagian besar didorong oleh domestik” (Sivakumar, 2012). Pada tahun 2009 - 2010 perekonomian India pulih lebih cepat dan tingkat pertumbuhan PDBnya adalah 8,6 persen dan pada 2010 - 2011 sebesar 9,3 persen. Ini menunjukkan ekonomi India tahan terhadap guncangan eksternal (Mukher, 2013).

Pertumbuhan ekonomi India yang cepat pasca liberalisasi terjadi karena beberapa faktor seperti adanya kemajuan dibidang teknologi. Sehingga India pun semakin diperhitungkan sebagai Negara dengan perekonomian kuat. Perkembangan ekonomi India yang pesat tersebut berawal dari adanya liberalisasi ekonomi India pada tahun 1990an (Kattuman, 2010). Tujuannya ialah untuk menjadikan ekonomi India lebih berorientasi pasar dan juga untuk memperluas peran investasi swasta dan asing. Liberalisasi ekonomi India tersebut terjadi karena adanya masalah neraca pembayaran sejak 1985 dan pada akhir 1990. Akibatnya India mengalami krisis ekonomi yang serius. Pemerintah pun hampir gagal dalam membayar pinjaman, bank sentralnya pun telah menolak kredit baru dan cadangan devisa telah berkurang sehingga India hampir tidak dapat membiayai impor mingguannya. Krisis neraca pembayaran pada tahun 1991 mendorong negara tersebut mendekati kebangkrutan.

Pemerintah India yang ketika itu dipimpin oleh Narasimha Rao memutuskan untuk memulai reformasi yang secara kolektif

dalam media India disebut sebagai liberalisasi publik (Malone, D & Chaturvedy, Rajiv. 2009). Lebih lanjut dijelaskan oleh Malone, D dan Chaturvedy, Rajiv dalam tulisannya yang berjudul *Impact of India's Economy on its Foreign Policy Since Independence* (Malone, D & Chaturvedy, Rajiv. 2009) Narasimha Rao menunjuk Manmohan Singh sebagai penasihat ekonomi yang khusus ditunjuk untuk mengimplementasikan liberalisasi. Sehingga akhirnya reformasi berkembang lebih lanjut dengan membuka diri terhadap investasi asing, mereformasi pasar modal, menderegulasi bisnis domestik dan mereformasi rezim perdagangan.

Selain itu dampak yang paling berpengaruh ialah adanya perubahan dalam arah kebijakan ekonomi India. Banga dan Das (Banga, Rashmi & Das, Abhijit. 2012) dalam tulisannya yang berjudul *Twenty Years of India's Liberalization: Experiences and Lessons* menyatakan bahwa dimulai tahun 2000an India mulai memperluas pasarnya dan mencari sumber daya alam yang bisa dieksplorasi untuk dilakukan penanaman modal asing atau *foreign direct investment*. Sehingga akhirnya di tahun 2002 pemerintah India mengeluarkan sebuah program yaitu *'Focus Africa'*. Tujuan diluncurkannya program tersebut ialah untuk menjalin kerjasama dengan Negara – Negara di kawasan Afrika ke tingkat yang lebih serius.

Program *Focus Africa* mencakup 10 negara dan 2 tahun kemudian ditambah lagi sehingga totalnya menjadi 23 negara. Hal

tersebut dilakukan India karena melihat potensi sumber daya alam dan pasar di Afrika yang menjanjikan. Afrika terkenal dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun tidak memiliki cukup teknologi untuk mengolahnya. Selain itu Negara – Negara di Afrika memerlukan bantuan investasi asing dari Negara lain untuk membantu meningkatkan perekonomian dan mengembangkan pembangunan di segala bidang. Kebutuhan akan komoditi impor barang yang diperlukan di dalam Negeri juga mengharuskan Negara-Negara di Afrika untuk melakukan kerjasama dengan Negara lainnya seperti India salah satunya.

4.2 Peluang Perdagangan Dan Investasi Asing Langsung di Sudan

Sudan merupakan salah satu Negara di kawasan Afrika yang menjadi target program 'Focus Africa' India. Kepentingan komersial dan bisnis dari perusahaan negeri maupun swasta India telah mengumpulkan momentum lebih lanjut karena perubahan positif tertentu yang terlihat saat ini di Sudan. Ekonomi Sudan telah melonjak secara signifikan. Dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 8% pada 2005, yang diproyeksikan oleh Dana Moneter Internasional meningkat menjadi 13% pada 2006. Sudan adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika (Ray, 2007). Menurut Ray dalam tulisannya *Sudan Crisis: Exploring India's Role* (Ray, 2007),

Sudan memiliki tingkat inflasi yang rendah dan yang paling penting, sumber pertumbuhannya bukan hanya minyak meskipun menyumbang sekitar 80 persen dari eksportnya.

Sudan menjadi salah satu Negara terbesar di Afrika sebelum terpecah menjadi 2 (dua) pada juli 2011. Populasi Sudan lebih dari 30 juta penduduk dengan tingkat pertumbuhan tahunan 2,6% dan kepadatan populasi 10,2 ribu per km² (www.bbc.com). Sekitar 67% dari populasi tersebut tinggal di daerah pedesaan sedangkan 33% tinggal di daerah perkotaan. Karakteristik demografis negara menunjukkan struktur populasi muda dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun mencapai sekitar 45% dari total populasi. Menurut Sensus terakhir tahun 1993, total perkiraan angkatan kerja berjumlah 9 juta dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Struktur pekerjaan sejak 1996 didominasi oleh pertanian 55% diikuti oleh jasa 10%, industri 5%, transportasi 6% dan konstruksi 3% (www.casscanada.ca).

Selain sumber daya alam, pertanian, dan hewannya yang berlimpah, Sudan juga memiliki kekayaan mineral yang potensial yaitu minyak bumi. Sudan merupakan negara ke 5 (lima) di Afrika dalam hal investasi langsung oleh negara-negara Asia. Tiga investor terbesar Sudan adalah Cina, Malaysia, dan India (IKV Pax Christi. 2008). Investasi yang terbesar ialah di sektor mineral Sudan seperti Minyak bumi. Saat ini

minyak bumi menjadi yang paling penting dengan terbukti secara komersial sudah banyak dilirik oleh Negara – Negara luar salah satunya ialah India. Selain minyak bumi terdapat juga mineral lainnya seperti bijih besi, tembaga, mika, seng, kromat dan mangan. Terdapat juga sumber daya non-ferrous seperti plester, kapur dan pasir hitam juga tersedia dalam jumlah yang cukup besar dan berpotensi untuk diperdagangkan. Lebih lanjut dalam tulisan IKV Pax Christi (IKV Pax Christi. 2008) yang berjudul *Sudan Whose's Oil* menyatakan bahwa hal tersebut merupakan basis nyata bagi pengembangan industri Sudan. kendati demikian sektor industri Sudan masih bergantung pada input bahan baku pertanian seperti minyak nabati, tebu, kapas, jangat, kulit dll. Dengan semakin berkembangnya potensi sumber daya agroindustri ini, peluang investasi akan berkembang dan mendorong pembuatan alat-alat produksi yang terkait dengan pertanian, yang nantinya diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor tanaman dan hewan.

4.3 Analisa Upaya India Dalam Mendorong Investasi Asing Dan Perdagangan Di Sudan

Pasca liberalisasi ekonomi dan diluncurkannya kebijakan '*Focus Africa*' oleh pemerintah India. India pun berupaya melalui pemerintah maupun pelaku bisnisnya dalam melakukan investasi asing dan perdagangan di Sudan. Berikut upaya diplomasi komersial India melalui 2 (dua) aktivitas yaitu; aktivitas

primer atau upaya dari pelaku bisnis dan aktivitas sekunder atau upaya dari pemerintah berdasarkan kerangka rantai diplomasi komersial menurut Potter (2004).

4.3.1 Upaya Diplomasi Komersial Melalui Aktivitas Primer

Aktivitas primer dalam diplomasi komersial dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Hal ini berkaitan dengan peran dari pelaku bisnis yang cukup besar untuk dapat mendorong perdagangan dan investasi asing di Sudan. Dalam diplomasi komersial upaya yang dapat dilakukan melalui aktivitas primer terdiri dari 5 bagian yaitu ; *Trade Promotion, Promotions Of Foreign Direct Investment, Co-operation In Science & Technology, Promotion Of Tourism dan Advocacy For National Business Community.*

Terdapat 2 (dua) agenda dalam melakukan *Trade Promotion* (Promosi dagang). Agenda pertama memuat tentang promosi perdagangan yang dilakukan dengan memberikan layanan bagi para eksportir seperti pengadaan seminar, bimbingan ekspor, pemberian panduan dan pendanaan ekspor. agenda kedua di antaranya adalah memasarkan penjualan, berpartisipasi dalam sejumlah pameran luar negeri, menganalisa pasar dan mengirimkan surat berita ekspor (Potter,2004).

India sendiri pada bulan Agustus tahun 2006 melalui *Associated Chambers of Commerce & Industry of India*, mengirimkan delegasi bisnisnya sebanyak 200 anggota ke Sudan dalam rangkaian bimbingan ekspor

(Large, 2008). Selain itu dalam pendanaan ekspor Pemerintah India melalui Bank Ekspor Impornya memberikan dukungan penuh dan sudah berjalan sejak 2004. Selanjutnya, bersamaan dengan dirayakannya 50 tahun hubungan diplomatik dengan Sudan, pelaku bisnis India melaksanakan pameran dagang pertamanya di Khourtoom. Pameran yang bertajuk '*Enterprise India Advantage Sudan Trade Fair*' menampilkan kurang lebih 78 perusahaan publik dan swasta India. Kegiatan tersebut menghasilkan nilai bisnis sebesar \$150 Juta (Large, 2008).

Selain upaya melalui *trade promotion* terdapat juga upaya melalui *Promotion of Foreign Direct Investments* (FDIS) atau promosi investasi asing langsung India memiliki sebuah wadah informasi dan bantuan teknis bagi para investor dalam negeri yang ingin berinvestasi di luar khususnya. Melalui Kementerian perdagangan dan industrinya atau *Ministry Of Commerce & Industry* dan juga bekerja sama dengan beberapa lembaga swasta lain yang terkait memberikan sebuah wadah yaitu '*Invest India*' (www.arthapedia.in). *Invest India* merupakan perusahaan yang didirikan melalui *joint venture* dengan Departemen Kebijakan & Promosi Industri (*Department Of Industrial Policy & Promotion*), Federasi Kamar Dagang dan Industri India (*Federation Of India Chambers of Commerce & Industry*) dan Pemerintah Negara Bagian India (*State Government Of India*). *Invest India* berfungsi dalam memberikan informasi berupa peluang investasi di luar negeri, sehingga

memudahkan para investor untuk membuat pilihan dalam berinvestasi.

Pememrintah India juga memberikan dukungan keuangan dan insentif fiskal bagi para investor yang ingin menamkan modalnya diluar negeri. India dalam hal ini secara umum membantu para investor dalam negerinya yang ingin berinvestasi diluar melalui sebuah lembaga yaitu *India's Infrastructure Development Finance Company* (IDFC). Tugasnya ialah untuk menjadi penghubung antara proyek dan lembaga keuangan dengan pasar keuangan. Lembaga ini juga menawarkan pinjaman, ekuitas/kuasi ekuitas, penasihat, manajemen aset dan layanan sindikasi (<https://ppp.worldbank.org>). Sehingga melalui lembaga ini investor India berani untuk berinvestasi di Sudan pada tahun 2003 sebesar \$750 juta yang merupakan investasi terbesar kedua India di sektor minyak setelah tahun 2001 di Rusia. Investasi ini dilakukan oleh perusahaan milik Negara OVL (*ONGC Videsh Limited*).

Investasi India di Sudan juga tidak terkonsentrasi hanya di sektor energi. Mereka juga telah berekspansi ke sektor listrik dan infrastruktur seperti kereta api serta obat-obatan. India telah menandatangani perjanjian untuk melakukan proyek pembangkit listrik termal senilai \$392 juta (Ray, 2007). Investasi tersebut merupakan investasi terbesar kedua di Sudan setelah proyek eksplorasi minyak OVL senilai \$1 miliar, yang sudah berjalan. Perusahaan sektor publik *Bharat Heavy Electricals Limited*

akan terlibat dalam menyiapkan proyek. Anak perusahaan *Indian Railways, Indian Railways Construction Company*, juga telah mendapatkan jalur kredit dari Pemerintah India untuk menghidupkan dan membangun kembali jalur kereta api sepanjang 203km dari Haiyya ke pelabuhan Sudan.

Upaya melalui *promotions on foreign direct investment* dan *trade promotions* diatas merupakan upaya yang paling signifikan dan sangat berpengaruh dalam mendorong perdagangan dan investasi asing di Sudan. Namun selain itu terdapat juga upaya lainnya yang mampu memberikan dorongan dalam perdagangan dan investasi asing oleh India yaitu melalui *Co-operation in Science and Technology*. Upaya ini ialah kerja sama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Negara sangat penting melakukannya karena untuk meningkatkan kapasitas teknis bagi sektor bisnis.

The Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) memiliki sejumlah program yang pada dasarnya bersifat bilateral. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya ITEC juga telah digunakan untuk program kerja sama yang disusun dalam konteks regional dan antar-regional seperti Komisi Ekonomi untuk Afrika, Sekretariat Persemakmuran, UNIDO, Kelompok 77 dan G-15. Program ITEC yang sepenuhnya didanai oleh Pemerintah India, telah berkembang selama bertahun-tahun. Di bawah ITEC dan program sejenisnya seperti *Special Commonwealth African Assistance Programme* (SCAAP) mengundang sejumlah

negara yang mencakup 161 negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, negara-negara Karibia & Pasifik serta Pulau-Pulau Kecil untuk berbagi dalam pengalaman pembangunan India yang sudah diperoleh lebih dari enam dekade India sebagai negara bebas.

Sudan adalah salah satu negara yang menerima manfaat utama di bawah Program Kerjasama Teknis dan Ekonomi India (ITEC). Terdapat peningkatan kursi dalam program ITEC yang dibawa India khusus untuk Sudan. Kursi yang dimaksudkan ialah untuk program beasiswa, pelatihan diplomat dan personal teknis sektor perminyakan dan pelatihan khusus kepegawaian lainnya. Dari tahun 2002 – 2003 terdapat sebanyak 35 kursi dan terus meningkat hingga 170 kursi pada tahun 2009.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan dalam diplomasi komersial melalui aktivitas primer yaitu Promosi pariwisata. Pada dasarnya promosi pariwisata dilakukan oleh negara yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Para aktor yang melakukan promosi pariwisata dibekali dengan beragam materi promosi tentang potensi tempat wisata yang dimiliki oleh negaranya. Keindahan dan keunikan yang menjadi ciri khas suatu negara dipresentasikan dengan tujuan untuk membangun persepsi masyarakat asing terhadap keunggulan sektor pariwisata di negara tersebut. Bagi negara yang menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan promosi pariwisata melalui

Kementrian Pariwisata atau Badan Pariwisata Nasional.

Namun dalam kaitannya dengan peningkatan investasi asing dan perdagangan di Sudan, India masih belum melakukannya melalui bidang promosi pariwisata. Hal ini juga dilihat dari negara Sudan pada periode tahun 2002 – 2009 yang masih mengalami proses pembangunan ulang dalam tatanan pemerintah, politik dan perekonomian. Sehingga upaya India melalui promosi pariwisata dalam meningkatkan investasi asing dan perdagangan belum dapat berjalan.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan melalui aktivitas primer ialah *Advocacy For National Business Community*. Advokasi sektor bisnis merupakan aktivitas diplomasi komersial yang tengah berkembang. Dalam aktivitas ini, KostECKI dan Naray dalam tulisannya *Commercial Diplomacy And International Business* (KostECKI dan Naray, 2007) menggambarkan bahwa para aktor akan terlibat dalam sejumlah urusan publik yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan nasional maupun bagi asosiasi bisnis.

Pada periode tahun 2002 hingga 2011 terdapat sejumlah kesepakatan atau agreement yang telah dilakukan India dengan pihak Sudan. kesepakatan yang paling penting dalam mempengaruhi perdagangan dan investasi asing India di Sudan terjadi pada tahun 2003. Tahun 2003 India dan Sudan menandatangani sebuah kesepakatan dalam bidang investasi yaitu BITs (*Bilateral*

Investment Treaties). Selanjutnya tahun 2004 Pemerintah India dan Sudan juga sudah menandatangani kesepakatan dalam hal *The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income* (www.taxsutra.com).

Tahun 2006 India dan Sudan menandatangani sebuah kesepakatan dalam bidang teknologi yaitu *The Pan-African E-Network Country* untuk pembentukan jaringan satelit dan serat optik agar memudahkan komunikasi dan konektivitas dengan 53 anggota Uni Afrika. India dan Sudan juga membentuk sebuah *Joint Ministerial Commission* yang pertemuannya dihadiri oleh menteri Luar negeri masing – masing negara.

Terkait dengan kesepakatan dan peraturan perdagangan internasional, telah dilakukan India dan Sudan pada 22 Oktober 1966 di New Delhi, India (www.commonlii.org). Kesepakatan perdagangan antara India dan Sudan tersebut masih digunakan hingga saat ini, sehingga India dan Sudan pun belum ada memperbarui kesepakatan perdagangan internasional mereka.

4.3.2 Upaya Diplomasi Komersial Melalui Aktivitas Sekunder

Upaya diplomasi komersial melalui aktivitas sekunder dapat dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mendorong perdagangan dan investasi asing. Serta pihak swasta pun memerlukan dukungan

pemerintah agar kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Terdapat 4 (empat) cara yang dapat dilakukan melalui aktivitas sekunder, yaitu; *Intelligence, Networking & Public Relations, Contract Negotiator Of Implementation dan Problem Solving.*

Upaya yang pertama ialah melalui *Intelligence* (Inteligensi), yang dalam diplomasi komersial meliputi penggalian informasi dan mengurus segala hal yang dibutuhkan dalam membangun hubungan bisnis antara *home country* dengan *host country*. India dibawah *Department Of Revenue* (Kementrian Pendapatan) memiliki sebuah badan yang bernama *Central Economic Intelligence Bureau* (CEIB). Badan ini terkait dengan Intelijen India yang bekerja untuk memantau dan mengumpulkan informasi di sektor keuangan dan ekonomi. badan intelijen ini sifat kerjanya ialah kedalam pemerintahan India, yang artinya berfungsi untuk mengawasi kegiatan perekonomian di dalam Negeri dan lebih kepada untuk mengawasi pelanggaran – pelanggaran yang berkaitan dengan ekonomi. Sehingga jika dilihat dari upaya diplomasi komersial dalam '*Intelligencies*', India belum berupaya melalui bidang tersebut di Sudan. India hanya memiliki sebuah penyedia informasi terkait Investasi Asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui Kementrian perdagangan dan industrinya atau *Ministry Of Commerce & Industry* yang bernama '*Invest India*' (www.arthapedia.in).

India juga memiliki *Indian Brand Equity Foundation* (IBEF) yang bekerja erat dengan para pemangku kepentingan lintas pemerintah dan industri dalam mempromosikan dan menciptakan kesadaran internasional label 'Made in India' di pasar luar negeri dan untuk memfasilitasi penyebaran pengetahuan tentang produk dan layanan India (commerce.gov.in). IBEF adalah perserikatan yang didirikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri India pada tahun 2003.

Upaya kedua yaitu melalui *Networking And Public Relations*. Membangun jaringan bisnis dibutuhkan karena keberadaan mitra bisnis dapat membantu mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan membangun hubungan masyarakat merupakan strategi penting bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di negara *host country*. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam aktifitas diplomasi komersial yaitu; Pertama, membangun relasi bisnis dengan pemimpin perusahaan dan Kedua, menghadiri sejumlah forum bisnis di *home* atau *host country*.

Terdapat sejumlah pertemuan yang telah diupayakan oleh India dengan Sudan dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang Ekonomi dan juga meningkatkan hubungan baik diantara kedua belah Negara. Seperti halnya pertemuan *India - Sudan Joint Working Group on Oil and Gas* yang berlangsung pada bulan November 2010. Pertemuan antara pemimpin perusahaan

juga berlangsung pada bulan Agustus tahun 2006 melalui *Associated Chambers of Commerce & Industry of India*. Selain itu melalui pemerintah India, dilaksanakan sebuah pameran dagang pertama di Khourtoom yang bertajuk '*Enterprise India Advantage Sudan Trade Fair*'. Terdapat juga *Indian Brand Equity Foundation* (IBEF) yang bekerja erat dengan para pemangku kepentingan lintas pemerintah dan industri dalam mempromosikan dan menciptakan kesadaran internasional label '*Made in India*' di pasar luar negeri dan untuk memfasilitasi penyebaran pengetahuan tentang produk dan layanan India (commerce.gov.in).

Upaya ketiga dari pemerintah dalam diplomasi komersial yaitu melalui *Contract Negotiator Of Implementation*. Aktivitas ini sangat penting dalam diplomasi komersial karena tidak hanya menyangkut hubungan antar pelaku bisnis *host country* dengan *home country*, tetapi juga pemerintah *host country* dengan *home country*. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa negosiasi bisnis antara pelaku bisnis dan pemerintah *host country* dengan *home country*.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah memberikan sebuah wadah yaitu, *Foreign Office Consultations* antara India dan Sudan yang pertama kali berlangsung di Khartoum sejak tahun 2000. Wadah ini berada dibawah Kementerian Luar Negeri India yang membahas mengenai hubungan bilateral di berbagai bidang seperti; politik, perdagangan, investasi, pertahanan dan keamanan, pengembangan sumber daya

manusia dan kapasitas pembangunan, pertanian, jalur kredit (*Line of Credit*) dan tinjauan budaya. Selain itu kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional dan multilateral.

Upaya terakhir ialah melalui *Problem Solving* yang mana aktivitas penyelesaian masalah bisnis dibutuhkan terkait dengan kebijakan dan peraturan di *host country* yang dapat merugikan pelaku bisnis dalam negeri, atau untuk menyelesaikan kasus sengketa bisnis. Dalam upaya ini pemerintah India melalui Kementerian Luar Negerinya membentuk sebuah utusan khusus dalam menangani permasalahan yang muncul terkait sengketa bisnis perusahaan milik India dengan Negara lain.

Namun sepanjang tahun 2002 – 2011 belum ditemui permasalahan yang berarti terkait perdagangan dan investasi asing antara India dan Sudan. sehingga upaya pemerintah India melalui *problem solving* tidak berjalan. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus lainnya yang pernah dialami India terkait perdagangan dan Investasi asing. India melalui kementerian luar negerinya mengirimkan utusan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah India dengan perusahaan Nasional maupun swasta dalam membantu menyelesaikan sengketa bisnis.

5. KESIMPULAN

Upaya diplomasi komersial yang dilakukan India tidak semuanya maksimal. Adapun upaya India yang maksimal melalui diplomasi komersial yaitu; *Trade Promotion, Promotion of Foreign Direct Investment, Co-operation in Science and Technology, Advocacy for National Business Community, Networking and Public Relations* dan *Contract Negotiator of Implementation*. Ke 6 (enam) poin tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga upaya oleh pemerintah maupun pelaku bisnis dapat secara optimal dilakukan. Namun bukan berarti poin lain seperti; *Promotion on Tourism, Intelligence* dan *Problem-solving* tidak dilakukan. Hanya saja dalam meningkatkan perdagangan dan investasi asing di Sudan, agar hasilnya sesuai harapan yang perlu dimaksimalkan oleh India ialah ke 6 (enam) poin diatas.

Melalui 6 (enam) upaya tersebut, India mampu untuk mendorong perdagangan dan investasi asingnya di Sudan selama periode 2002 – 2011. Peningkatan perdagangan terjadi pada tahun 2005 – 2009. Meskipun sempat menurun sebanyak 4% di tahun 2010, tahun 2011 India kembali mampu meningkatkan ekspornya ke Sudan sebesar 5% (www.mea.gov.in). Sehingga pada periode tersebut India menjadi pengekspor komoditas keenam terbesar ke Sudan setelah Arab Saudi, Cina, Uni Emirat Arab, Jerman, dan Inggris (Ray, 2007). Investasi Asing India di Sudan pun mengalami peningkatan pasca investasi awal oleh OVL di

tahun 2003. Investasi tersebut membuka peluang bagi investor India baik negeri maupun swasta untuk membuka usahanya di Sudan. Terdapat beberapa perusahaan asal India seperti; BHEL, *Indian Railways*, Larsen dan Toubro, TATA International, *Kirloskar Brothers* dan lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Carrin B, Lisa. 2016. “*Soft Power Effors, Hard Power Gains*” *India’s Economic Diplomacy Toward Africa Using Nigerian And Kenya As Example*. University Of Cape Town. Diakses melalui <https://open.uct.ac.za/handle/11427/20639>.
- IKV Pax Christi. 2008. *Sudan Whose Oil. European Union*. Diakses melalui: <https://www.paxforpeace.nl/media/files/sudans-whose-oil.pdf>
- Kostecki, M & Naray, O. 2007. *Commercial Diplomacy And International Business*. Netherlands. Diakses melalui: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf.
- Large, Daniel. 2008. *Sudan’s foreign relations with Asia China and the politics of ‘looking east’*. Institute For Security Studies. Diakses melalui: <https://issafrica.org/research/papers/sudans-foreign-relations-with-asia->

- china-and-the-politics-of-looking-east.
- Malone, D & Chaturvedy, Rajiv. 2009. *Impact of India's Economy on its Foreign Policy Since Independence*. New Delhi. Diakses melalui: https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/Indian__Economic__and__Foreign__Policy.pdf.
- Ray, Nivedita. 2007. *Sudan Crisis: Exploring India's Role*. Routledge. Diakses melalui: <https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/wp2010-36-china-india-sudan-web.pdf>.
- Saner, R & Yiu, L. 2001. *International Economic Diplomacy: Mutations in the Post-modern Times*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'
- Sivakumar, Marimuthu. 2012. 2008 *Global Economic Crisis and Its Impact on India's Export and Import*. CNCollage
- Worldbank. 2018. *India Development Update "India's Growth Story"*. New Delhi: The World Bank. Diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/814101517840592525/pdf/India-development-update-Indias-growth-story.pdf>.
- <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094995>. diakses pada 3 Maret 2018
- <http://www.casscanada.ca/sudan-information-before-independence/>. Diakses pada 3 Maret 2018